

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AG, Subarsono. 2011, *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm 11.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, Depok: PT Raja Grafindo, hal. 107.
- Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UGM Press.
- Jaya, I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia. 2020).
- Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2019), hal. 67.
- Raco, Jozef, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. (Jakarta: PT Grasindo. 2010).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hal. 125.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. (Bandung: Alfabeta, 2018)
- Syahrudin, *Penerapan Program Publik; Konsep, Teori dan Studi Kasus*. (Bandung: Nusa Media, 2017), hal 27-68

Jurnal:

- Agatha Ginting, Rumenda. “Efektivitas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Dalam Melaksanakan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Pada Pelajar dan Mahasiswa”. 2019
- Husna A.F & Prabawati I. “Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Tulungagung (Studi Pada Pencegahan P4GN)”, *Publika*, 2019 Vol 7, No 6.
- Roennfeld S & Bernadette S, “Evaluasi Komunikasi: Studi Kasus Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Penggiat Anti Narkoba Oleh BNN Jakarta Timur”, *Jurnal Sosio Dialektika*, 2021, 6 (2).

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN).

Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional.

Media Online:

<https://bnn.go.id>, diakses pada 22 Maret 2022.

<https://bps.go.id>, diakses pada 6 Maret 2022.

<https://jaktimkota.bnn.go.id>, diakses pada 5 Maret 2022.





UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext 146, Fax 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

SURAT TUGAS

Nomer : 60 /WD/IV/2022

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional menugaskan kepada dosen berikut ini :

Nama : Dr. Ahmad Muksin, M.Si
NID : 0101200647
Pangkat Akademik : Lektor
Unit Kerja : FISIP Universitas Nasional

Untuk dapat bertindak sebagai Pembimbing Skripsi pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 atas nama mahasiswa :

Nama : Farhan Abror Aziz
NPM : 183112351550150
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jangka waktu penulisan skripsi antara tiga sampai enam bulan.
2. Memberikan bimbingan secara teratur minimum delapan kali konsultasi dengan mengisi formulir I.
3. Penulisan Skripsi mengikuti pedoman sebagaimana tercantum dalam bukupedoman penulisan dan Ujian Skripsi yang dikeluarkan Fakultas.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Jakarta, 25 April 2022
Wakil Dekan,

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TERAKREDITASI BAN-PT

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520
Telp. (021) 70737624, 7806700 Ext.146, Fax 7802718-7802719
Homepage : <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

Nomor : 60/WD/IV/2022 Jakarta, 25 April 2022
Lamp : 1 (Satu) Berkas
Hal : Kesediaan Membimbing Skripsi

Kepada
Yth

: Bapak Dr. Ahmad Muksin, M.Si
Dosen FISIP Universitas Nasional
Di Jakarta

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nasional
meminta kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing penulisan Skripsi yang di
susun oleh :

Nama : Farhan Abror Aziz
NPM : 183112351550150
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN) Badan Narkotika Nasional Kota
Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021

Kesediaan Bapak/Ibu memberikan bimbingan secara intensif sangat kami
harapkan. Diminta bapak/Ibu **Memberikan Jawaban Segera** dengan
memberikan tanda tangan di bawah ini dan untuk menghitung beban tugas,
diminta segera mengembalikan kepada Pimpinan Fakultas melalui Sekretariat.

Demikian, Terima Kasih.

~~Bersedia/Tidak Bersedia~~
Sebagai Pembimbing

Wakil Dekan

Dr. Ahmad Muksin, M.Si.

Dr. Bhakti Nur Avianto, M.Si

* coret yang tidak perlu.



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 12%

Date: Sunday, August 14, 2022

Statistics: 1946 words Plagiarized / 16785 Total words

Remarks: Low Plagiarism Detected - Your Document needs Optional Improvement.

UNIVERSITAS NASIONAL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021 SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) Farhan Abror Azis NPM. 183112351550150 FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK 2022 i	
DAFTAR ISI DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	
iv BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	
11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Penelitian Terdahulu	15
2.1.1 Penelitian Terdahulu Himma Faridatul Husna dan Indah Prabawati S.Sos., M.Si. (2019)	15
2.1.2 Penelitian Terdahulu Rumenda Agatha Ginting (2019)	16
2.1.3 Penelitian Terdahulu Sylvia	



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA JAKARTA TIMUR
NATIONAL NARCOTICS BOARD CITY OF EAST JAKARTA
Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Gd. B-2 Lt. 4
Jalan Dr. Sumarno - Pulo Gebang Cakung Jakarta Timur 13950
Telp / Fax: 021-4800974; Email : bnnkotajakartatimur@gmail.com;
https://www.facebook.com/bnnkjaktim

Lembar Disposisi Jabatan

Nomor Agenda/ Registrasi :	185	Tingkat Keamanan :	SR /R/ B/P
Tanggal Penerimaan :	20-6-2022	Tgl. Penyelesaian :	
Tanggal dan Nomor Surat :	20-6-2022, NO: 552/W9/V1/2021		
Dari :	Wakil Dekan Universitas Nasional		
Ringkasan Isi :	Permohonan Penelitian dan Informasi Data		
Lampiran :			
Disposisi :	Diteruskan Kepada	Paraf :	
Kepada : Pak Fleury			
- Uta Feina			
			
28/6 2022			

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian: Penerapan Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Badan Narkotika Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021.

Menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik Van Meter dan Van Horn:

Standar dan Sasaran Kebijakan : Indikator ini yang menjadi ukuran yang digunakan sebagai acuan dan tujuan suatu kebijakan. standar dan suatu sasaran dalam kebijakan harus jelas dan terstruktur dengan berbagai ketentuan.	
Kepala BNNK Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Apa yang menjadi ukuran dan tujuan dari Kebijakan P4GN ini sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Jakarta Timur ?2. Bagaimana cara agar tujuan Kebijakan P4GN ini dapat terimplementasi ?3. Apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan tujuan kebijakan ?
Kepala Seksi P2M	<ol style="list-style-type: none">1. Apa saja ukuran dan tujuan keberhasilan dari setiap program P2M sebagai bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Jakarta Timur ?2. Bagaimana cara agar tujuan program-program P2M dapat terlaksana dengan baik ?3. Apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan program-program P2M ?4. Program apa saja yang dijalankan oleh seksi P2M sebagai bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ?

<p>Kepala Seksi Pemberantasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi ukuran dan tujuan kebijakan P4GN sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba ? 2. Bagaimana cara agar tujuan Kebijakan P4GN dapat terimplementasi ? 3. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan tujuan kebijakan ?
<p>Kepala Seksi Rehabilitasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang menjadi ukuran dan tujuan dari program rehabilitasi sebagai bentuk upaya pemulihan penyalahgunaan narkoba BNNK Jakarta Timur ? 2. Bagaimana cara agar tujuan program rehabilitasi dapat terimplementasi ? 3. Apa yang menjadi faktor utama keberhasilan tujuan program rehabilitasi ?
<p>Sumber Daya : Indikator yang menilai bagaimana memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dalam implementasi kebijakan.</p>	
<p>Kepala BNNK Jakarta Timur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sumber daya yang dimiliki memadai dalam melaksanakan Kebijakan P4GN ? 2. Apakah sumber daya manusia dalam organisasi melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal ? 3. Selain sumber daya manusia, apakah sumber daya anggaran memadai dalam mengimplementasikan Kebijakan P4GN ?
<p>Kepala Seksi P2M</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sumber daya yang dimiliki Seksi P2M sudah memadai dalam menjalankan program-program P2M ? 2. Apakah sumber daya dalam organisasi khususnya pada Seksi P2M menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal ?

<p>Kepala Seksi Pemberantasan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sumber daya yang dimiliki seksi pemberantasan sudah memadai dalam melaksanakan program-program pemberantasan ? 2. Apa saja kekurangan dari sumber daya yang ada di seksi pemberantasan ?
<p>Kepala Seksi Rehabilitasi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah sumber daya yang dimiliki seksi rehabilitasi memadai dalam melaksanakan program-program rehabilitasi ? 2. Apakah sumber daya manusia dalam organisasi melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal ?

<p>Komunikasi Antar Organisasi : Indikator yang menjelaskan bagaimana kebijakan dipahami oleh pelaksana kebijakan. komunikasi dalam rangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan.</p>	
<p>Kepala BNNK Jakarta Timur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan dengan lembaga yang bekerjasama dalam melaksanakan Kebijakan P4GN ? 2. Apakah terdapat kendala dengan lembaga/organisasi yang bekerjasama dalam implementasi Kebijakan P4GN ? 3. Bagaimana cara agar komunikasi dan hubungan antar organisasi dapat berjalan dengan baik ? 4. Cara apa yang dilakukan jika terdapat tumpang tindih/<i>miscommunication</i> antar organisasi ?
<p>Kepala Seksi P2M</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan dengan lembaga/organisasi yang bekerjasama dalam menjalankan program-program P2M ? 2. Lembaga/organisasi apa saja yang bekerjasama dalam menjalankan program-program P2M ? 3. Apakah terdapat kendala dengan lembaga/organisasi yang bekerjasama dalam menjalankan program-program P2M ?

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bagaimana cara agar komunikasi dan hubungan antar organisasi dapat berjalan dengan baik ? 5. Cara apa yang dilakukan jika terdapat tumpang tindih/<i>mis communication</i> antar organisasi atau agen pelaksana dalam menyampaikan program-program P2M ?
Kepala Seksi Pemberantasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara agar komunikasi antar organisasi dapat berjalan dengan baik dalam mengkomunikasikan program-program pemberantasan ? 2. Apa cara yang dilakukan jika terdapat tumpang tindih/<i>mis communication</i> antar organisasi atau antar agen pelaksana dalam menyampaikan program-program pemberantasan ?
Kepala Seksi Rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan dengan lembaga yang bekerjasama dalam melaksanakan program-program rehabilitasi ? 2. Apakah terdapat kendala dengan lembaga/organisasi yang bekerjasama dalam mengimplementasikan program-program rehabilitasi ? 3. Bagaimana cara agar komunikasi dan hubungan antar organisasi dapat berjalan dengan baik ? 4. Cara apa yang dilakukan jika terdapat tumpang tindih/<i>mis communication</i> antar organisasi ?

Karakteristik Agen Pelaksana : Indikator yang menjelaskan bagaimana sikap pelaksana kebijakan dalam mengimplementasikan kebijakan oleh setiap agen pelaksana.

Kepala BNNK Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana para agen pelaksana menciptakan keselarasan dalam melaksanakan Kebijakan P4GN ? 2. Bagaimana bentuk kerjasama BNNK Jakarta Timur dengan lembaga/organisasi dalam melaksanakan Kebijakan P4GN ?
----------------------------------	--

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Bagaimana para agen pelaksana menyampaikan Kebijakan P4GN kepada masyarakat ? 4. Apakah terdapat penanggungjawab dalam setiap kegiatan/program yang dilaksanakan BNNK Jakarta Timur ? 5. Bagaimana para agen pelaksana mencapai tujuan dari pelaksanaan Kebijakan P4GN ?
Kepala Seksi P2M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana para agen pelaksana melaksanakan program-program P2M ? 2. Apakah terdapat penanggungjawab dalam setiap kegiatan/program P2M ?
Kepala Seksi Pemberantasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana para agen pelaksana menciptakan keselarasan dalam melaksanakan program-program pemberantasan ? 2. Bagaimana cara agen pelaksana dalam melaksanakan program-program pemberantasan ?
Kepala Seksi Rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana para agen pelaksana menciptakan keselarasan dalam melaksanakan program-program rehabilitasi ? 2. Bagaimana para agen pelaksana menyampaikan program-program rehabilitasi kepada pasien rehabilitasi ? 3. Apa saja kegiatan/program yang diselenggarakan Seksi Rehabilitasi kepada pasien rehabilitasi ? 4. Bagaimana para agen pelaksana mencapai tujuan Kebijakan P4GN melalui program-program yang diselenggarakan oleh Seksi Rehabilitasi ?

Disposisi Pelaksana : Indikator yang menjelaskan bagaimana sikap penerimaan atau penolakan atau pengetahuan dan pemahaman pelaksana kebijakan terhadap standar dan tujuan kebijakan.	
Kepala BNNK Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah para agen pelaksana mengimplementasikan Kebijakan sesuai dengan standar operasional prosedur ? 2. Bagaimana proses para agen pelaksana dalam mewujudkan Kebijakan P4GN ?
Kepala Seksi P2M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika terjadi kendala dalam pelaksanaan program-program P2M, bagaimana para agen pelaksana mengatasinya ? 2. Bagaimana proses para agen pelaksana dalam mewujudkan program-program P2M ?
Kepala Seksi Pemberantasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah para agen pelaksana mengimplementasikan Kebijakan P4GN sesuai dengan standar operasional prosedur ? 2. Jika terjadi masalah dalam pelaksanaan Kebijakan P4GN ini bagaimana para pelaksana mengatasinya ? 3. Bagaimana proses para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program-program pemberantasan ?
Kepala Seksi Rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana proses para agen pelaksana dalam mewujudkan program-program Seksi Rehabilitasi ? 2. Jika terjadi kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi, bagaimana para agen pelaksana mengatasinya ?

Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik : Indikator yang menjelaskan bagaimana lingkungan eksternal dapat turut mempengaruhi keberhasilan kebijakan.	
Kepala BNNK Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah lingkungan eksternal (masyarakat) dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan P4GN ?

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Bagaimana peran politik dalam mengimplementasikan Kebijakan P4GN ini ? 3. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan Kebijakan P4GN ?
Kepala Seksi P2M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah lingkungan eksternal dapat mempengaruhi proses pelaksanaan program-program P2M ? 2. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam mengimplementasikan program-program P2M ? 3. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan program-program P2M ?
Kepala Seksi Pemberantasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah lingkungan eksternal dapat berpengaruh dalam mengimplementasikan program-program pemberantasan ? 2. apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan program-program pemberantasan dalam aspek ekonomi, sosial dan politik ?
Kepala Seksi Rehabilitasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. apakah lingkungan eksternal dapat mempengaruhi proses berjalannya pelaksanaan program-program rehabilitasi ? 2. apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan program-program rehabilitasi ?

JAWABAN WAWANCARA

Nama Informan : Hendradjid Putut Widagdo, S.Sos., MM., M.Si

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Administrasi

Jakarta Timur

Tanggal wawancara : 8 Juli 2022

1. Apa yang menjadi ukuran dan tujuan dari Kebijakan P4GN ini sebagai bentuk upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba di Jakarta Timur ?

Untuk ukuran dari Kebijakan P4GN ini yaitu bagi mereka yang menggunakan narkoba dilakukan rehabilitasi, untuk mereka yang tidak mengetahui dilakukan pencegahan, dan bagi mereka yang mengetahui dilakukan pemberdayaan. Tujuan dari kebijakan ini yaitu untuk mencegah agar bisa membuat solusi dari permintaan dengan *demand reduction* berkurang maka *supply reduction* hilang secara perlahan.

2. Bagaimana cara agar tujuan Kebijakan P4GN ini dapat terimplementasi ?

Agar tujuan Kebijakan P4GN dapat terimplementasi maka dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu dengan cara *soft power approach* (pendekatan kekuatan lunak) yaitu melalui mencegah, memberdayakan, dan merehabilitasi, *smart power approach* (pendekatan kekuatan cerdas) dengan menggunakan teknologi, komunikasi, media sosial menggunakan segala bentuk kemudahan akses dan aksesibilitas, mereka bisa melakukan pelaporan melalui media komunikasi dan mempromosikan hidup sehat melalui media sosial, *hard power approach* (pendekatan kekuatan keras) dengan penegakkan hukum melalui aparat yang terlatih, modul-modul yang terlatih itu harus dikenalkan dari luar negeri, perlatannya harus diperbaharui, sistem-sistem gerakan penegakan hukum juga harus diperbaharui baik kerjasama kooperasi

kemudian dalam penyelidikan penyidikan penuntutan pengadilan pemenjaraan dan hukuman harus terus menjadi concern dari setiap aparat dan juga harus komitmen.

3. Apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan tujuan kebijakan ?

Yang pertama itu komitmen, untuk membuat komitmen itu harus sering dilakukan rapat koordinasi dan di evaluasi, yang kedua diukur tingkat keberhasilannya yaitu output kegiatan dibuat berdasarkan program dan anggarannya setelah direncanakan diprogram diberikan anggaran maka harus diadakan kegiatan, kegiatan inilah yang menjadi hasil dari outputnya, dan outcome yaitu kinerja manfaat yang dirasakan masyarakat harus jelas, bertambah pengungkapannya, jalur edarannya terputus, kemudian sindikatnya terungkap kemudian modus-modusnya tergali, masyarakat tercerdaskan, terpahamkan, masyarakat mampu menggerakkan, banyak pencandu lapor diri, banyak tempat rehabilitasi sesuai dengan standar, dan itu semua harus terukur.

4. Apakah sumber daya yang dimiliki memadai dalam melaksanakan Kebijakan P4GN ?

Di Jakarta timur ini sumber daya kami sangat kurang, kami seharusnya 99 ASN dalam 1 BNNK tetapi yang tersedia hanya 30 atau 1/3 nya, maka kami harus melakukan yang namanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, jadi setiap pegawai harus bisa memegang peranan berbagai beragam P4GN, kami pegawai semua harus bisa menyuluh, kami harus bisa menjadi penggiat, menggerakkan potensi masyarakat termasuk TKK jadi dari 30 pegawai BNNK ada 9 yang TKK, dan ada 4 polisi dan sisanya ASN. Kami menggerakkan semua itu menggunakan masyarakat yang kami sebut sebagai penggiat agen pemulihan kemudian relawan kemudian ceptu di pemberantas dan mereka itu ada di lapangan, merekalah yang melaporkan kepada kami, ini lah yang membantu kinerja pemberantasan, jika dibutuhkan penyuluhan kami membawa beberapa penggiat untuk ikut membantu penyuluh, kalau tenaga penyuluh BNNK kami kurang, hanya memiliki 2 penyuluh, 3 konselor, dan 3 penyidik, dengan kasus yang begitu besar dalam setahun tentunya itu kurang.

5. Apakah sumber daya manusia dalam organisasi melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal ?

Kalau tugas secara optimal diukur dari tingkat kinerja dan capaian tentunya kami mencapai target, misalnya bidang pemberantasan melalui tim assesmen terpadu melakukan assesmen bagi pecandu yang ditangkap sebanyak 17 dalam setahun, hari ini kami bisa mengungkap dan menambah 68 jadi 400%, hari ini rehab di target dalam setahun harus mendapatkan 50 rawat jalan, hari ini bulan Juni kami sudah mendapatkan 56 yang rawat jalan, jadi kami melaksanakan tugas pokok dan fungsi sudah dilakukan secara optimal dari capaiannya, tetapi jika dilihat dari sisi anggaran kami relatif kurang, lalu dilihat dari sisi komposisi porsi pekerjaan kami juga masih kurang.

6. Selain sumber daya manusia, apakah sumber daya anggaran memadai dalam mengimplementasikan Kebijakan P4GN ?

Untuk anggaran kami berasal dari APBN yang dialokasikan dari BNN, karena kami merupakan lembaga vertikal non kementerian BNN, BNNP, BNNK. Kemudian selain dari APBN kami juga bisa mendapatkan anggaran dalam bentuk hibah pemerintah daerah tergantung komitmen dari pemerintah daerah juga. Tetapi untuk tahun ini kami hanya mendapatkan anggaran yang berasal dari APBN yang dialokasikan dari BNN tetapi dengan adanya kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid, jadi untuk anggaran tahun ini mengalami pengurangan, tentunya kami harus memaksimalkan anggaran yang ada untuk merealisasikan program-program dan kebijakan BNNK Jakarta Timur

7. Bagaimana hubungan dengan lembaga yang bekerjasama dalam melaksanakan Kebijakan P4GN ?

Kami melakukan hubungan kerjasama itu dalam payung hukum instruksi presiden nomor 2 tahun 2020 dimana setiap kementerian, lembaga, lembaga pemerintah non kementerian, provinsi pemerintah daerah, dunia usaha itu harus melakukan P4GN, dan kemudian dalam kegiatannya mereka harus menganggarkan program dan anggaran masing-masing di bidang

P4GN, kami melakukan pemantauan sajumlahnya sudah dilaksanakan dicatat dan dilaporkan setiap 6 bulan kemudian beberapa kerjasama kami lakukan misalnya setiap sekolah/kampus ingin melakukan test urine, setiap awal tahun pegawai di pemerintah kota Jakarta Timur harus melakukan test urine di beberapa kelurahan kami harus buat dengan kelurahan BERSINAR dimana ada kegiatan P4N dan test urin.

8. Apakah terdapat kendala dengan lembaga/organisasi yang bekerjasama dalam implementasi Kebijakan P4GN ?

Adanya kendala dalam hal ego sektoral dimana mereka itu masih menggunakan anggarannya dan kurang memperhatikan anggaran dan program untuk P4GN, jadi masih berharap dari BNNK untuk test urine gratis padahal anggaran kami terbatas, kemudian yang keempat kendala komunikasi karena banyaknya kegiatan dan kurangnya anggaran untuk forum-forum komunikasi maka kami jarang melakukan koordinasi dan komunikasi antar lembaga yang kami lakukan adalah dengan melakukan audiensi saja kemudian melakukan diskusi dan juga melakukan rencana program.

9. Bagaimana cara agar komunikasi dan hubungan antar organisasi dapat berjalan dengan baik ?

Hubungan komunikasi dapat berjalan dengan baik tentunya kami harus sering menciptakan forum-forum pertemuan bersama, yang kedua dilakukan audiensi, saya selalu berkirim surat untuk sekedar kunjungan dari mulai lurah, walikota, kepala dinas-kepala dinas, kemudian saling membantu dalam meningkatkan kapasitas.

10. Cara apa yang dilakukan jika terdapat tumpang tindih/mis communication antar organisasi ?

Cara yang kami lakukan adalah dengan melakukan rapat bersama yang dipimpin oleh BNNP DKI kemudian kami melakukan surat menyurat kemudian menindak lanjutinya dengan menawarkan beberapa program kepada mereka sebagai bentuk komunikasi, misalnya saya datang ke lurah disana kami memfasilitasi diskusi antar FKDM dan lurah, dalam diskusi itu

kami menawarkan beberapa alternatif bagaimana meningkatkan ketahanan keluarga dan ketahanan masyarakat di bidang P4GN di lurah tersebut.

11. Bagaimana para agen pelaksana menciptakan keselarasan dalam melaksanakan Kebijakan P4GN ?

Jadi para agen pelaksana itu mereka terkoordinasi di dalam laporan inpres 6 bulan, jadi mereka melaporkan apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilaporkan dan apa yang pantas untuk dilaporkan, kan banyak yang sudah dilakukan tapi mereka biasanya jarang melakukan pelaporan, maka disini kami melakukan koordinasi, kemudian dari agen-agen kita para penggiat mereka kami buat grup whatsapp didalamnya banyak diskusi yang mengemuka dan kami memberikan hal-hal terbaru informasi P4GN dari BNN RI dan BNNP.

12. Bagaimana bentuk kerjasama BNNK Jakarta Timur dengan lembaga/organisasi dalam melaksanakan Kebijakan P4GN ?

Kami memiliki program dan kegiatan, dimana program dan kegiatan kami itu berdasarkan program dan kegiatan yang ada di pusat, jadi kami mengundang lembaga-lembaga dan institusi di lingkungan pemerintah, swasta, pendidikan, atau masyarakat untuk kami ajak dalam bimbingan teknis dan juga audiensi yang kami selenggarakan untuk nantinya mereka dapat mengetahui apa yang menjadi sasaran kebijakan dari setiap program dan kegiatan yang kami selenggarakan.

13. Bagaimana para agen pelaksana menyampaikan Kebijakan P4GN kepada masyarakat ?

Mereka menyampaikan kebijakan kepada masyarakat kita mohon kita wajibkan untuk memuat konten P4GN di berbagai media, juga misalnya setiap sambutan di Walikota, pembina upacara di sekolah-sekolah kita selalu membuka forum-forum diskusi dan sambutan di berbagai forum di masyarakat, di instansi pemerintah maupun swasta dengan pengantar sambutan bagaimana kita peduli narkoba dan menciptakan lingkungan bersih narkoba (BERSINAR) tentunya juga disesuaikan dengan anggaran yang dialokasikan ya.

14. Apakah terdapat penanggungjawab dalam setiap kegiatan/program yang dilaksanakan BNNK Jakarta Timur ?

Tentunya setiap kegiatan ada penanggungjawab, jadi bila ada operasi-operasi yang berkaitan dengan pemberantas maka koordinatonya adalah bidang pemberantasan, apabila terkait deteksi dini maka koordinasinya adalah terkait dengan bidang P2M, apabila terkait dengan kegiatan intervensi berbasis masyarakat yang melibatkan tenaga kesehatan di lurah atau dinas-dinas terkait kita melibatkan bidang rehab, dan tentunya apabila terkait pelaporan dengan informasi, konten, dan media kita libatkan humas di bidang umum. Setelah program dan kegiatan kami selenggarakan kami selalu mengadakan evaluasi apa saja yang menjadi kekurangan pada kegiatan, lalu kami cari solusinya, agar kegiatan selanjutnya tidak terjadi kesalahan yang sama pada kegiatan sebelumnya.

15. Bagaimana para agen pelaksana mencapai tujuan dari pelaksanaan Kebijakan P4GN ?

Supaya capaian tujuan maka kami sering melakukan rapat, koordinasi di setiap hari Selasa per minggu, jadi di situ kami rumuskan, rumusnya apa agar tujuannya tercapai, masing-masing memberikan informasi apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan, kemudian apa yang sudah kami lakukan kami evaluasi apa saja kekuatannya, peluangnya, kelemahannya, dan gangguannya supaya pada saat pelaksanaannya tindak lanjutnya dapat mengurangi resiko, akan meningkatkan kualitas layanan juga akan memberikan kontribusi yang lebih nyata yang dirasakan masyarakat.

16. Apakah para agen pelaksana mengimplementasikan Kebijakan sesuai dengan standar operasional prosedur ?

Betul, jadi setiap kami bekerja itu menggunakan standar operasional prosedur yang setiap tahun kami tambah, kami evaluasi, dan kami revisi, karena sesuai dengan payung hukum bahwa pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, dan juga hak-hak masyarakat harus dikedepankan, bagaimana bisa mengedepankan jika standar operasinya tidak pernah kita

evaluasi, sehingga setiap apapun masalah kita akan lihat dahulu apakah SOP ini sudah dilaksanakan atau belum.

17. Bagaimana proses para agen pelaksana dalam mewujudkan Kebijakan P4GN ?

Prosesnya itu mereka terstruktur, artinya setiap orang memiliki tugas dan wewenang masing-masing, kepala bertanggungjawab atas segala kegiatan itu kemudian anggota bertanggungjawab atas koordinasi yang sudah didapatkan, setiap koordinasi itu dilaksanakan implementasi oleh masing-masing sub anggota tadi, oleh karenanya setelah mereka selesai akan ada evaluasi bersama kemudian diputuskan apakah layanan ini ditingkatkan, ditetapkan, ataupun diganti.

18. Apakah lingkungan eksternal (masyarakat) dapat mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan P4GN ?

Betul, jadi masyarakat memiliki wewenang, memiliki hak, memiliki satu kewajiban untuk mengoreksi kami, misalnya dalam pertemuan berbasis online dengan masyarakat, baik dengan siswa sekolah, mahasiswa, ibu-ibu PKK, para perangkat desa, atau sudin koordinasi, mereka bisa memberikan masukan kemudian kritikan juga bisa memberikan argumen atau narasi, hal tersebut bisa mempengaruhi kebijakan yang kami lakukan selama ini, contohnya jadi masyarakat bisa melaporkan, menangkap, dan membawa seseorang yang masyarakat duga sebagai pembandar sindikat pengedar kepada pihak BNNK yang selanjutnya akan kami tindak sesuai dengan peran BNN.

19. Bagaimana peran politik dalam mengimplementasikan Kebijakan P4GN ini ?

Dengan adanya komitmen dan perhatian dari pemerintah kota terhadap BNK Timur, seperti misalnya meminta bantuan untuk bisa melaksanakan tes urine setiap tahunnya bagi seluruh pegawai pemkot dan menjadi persyaratan wajib bagi seluruh pegawai baru di pemkot untuk melakukan tes urine. Dalam setiap kegiatan Pemkot juga selalu mensosialisasikan anti narkoba dan bahaya narkoba sebagai bentuk upaya dalam memberantas narkoba.

20. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan Kebijakan P4GN ?

Yang pertama kami terdapat kendala dalam anggaran, jadi setiap rencana untuk memperbaiki kegiatan atau untuk memperbaiki pelayanan dan sistem dari tahun sebelumnya selalu terkendala dalam anggaran, karena setiap anggaran selalu ada pengurangan, refokusi, penghematan, dan keterbatasan anggaran, yang kedua faktor penghambatnya yaitu adanya ego sektoral di setiap bidang, misalnya setiap sub koordinator apabila mereka terjadi pecah kongsi antar anggota, maka kegiatan ini juga bisa menghambat, yang ketiga adalah adanya mis komunikasi antar bidang, jadi harus diselaraskan persoalannya harus tau kapan kita bersinergi, kapan kita harus berkompetisi, dan tau kapan kita harus berdampingan dalam melaksanakan kebijakan ini. Adapun yang menjadi faktor pendukung yaitu semangatnya, sepanjang kami bagaimana bersama-sama mensukseskan kebijakan P4GN di jajaran BNNK Jakarta Timur, maka semangat yang sama itu akan membangun komitmen, membangun konsoliditas, membangun empati, membangun partisipasi dari semua pihak, yang kedua yaitu penghargaan kami sangat senang apabila usaha kami dihargai oleh masyarakat dengan cara mengundang kami untuk bisa berperan aktif melakukan lingkungan bersih narkoba di lingkungan mereka.



JAWABAN WAWANCARA

Nama Informan : Heri Santosa, SE., MM

Jabatan/Pekerjaan : Staf Seksi P2M BNNK Jakarta Timur

Tanggal Wawancara : 18 Juli 2022

1. Apa saja ukuran dan tujuan keberhasilan dari setiap program P2M sebagai bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di Jakarta Timur ?

Untuk ukuran dari program P2M itu menurunnya tingkat prevalensi penyalahgunaan narkoba tentunya ya, tersampainya informasi P4GN kepada masyarakat, untuk tingkat pencegahannya ya sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat, dengan terciptanya masyarakat yang imun akan narkoba, istilahnya lingkungan tersebut menjadi lingkungan yang tidak melakukan penyalahgunaan narkoba tapi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif yang menghasilkan penghasilan yang lebih baik daripada narkoba.

2. Bagaimana cara agar tujuan program-program P2M dapat terlaksana dengan baik ?

Agar tujuan tercapai dengan baik dilakukan sinergitas antar stakeholder, setiap program dan kegiatan harus didukung oleh pemerintah daerah setempat terutama dari kelurahan maupun rt/rw, maupun masyarakat-masyarakat yang mendukung P4GN. Serta keterampilan dari para penyuluh untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi bahaya narkoba di masyarakat.

3. Apa yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan program-program P2M ?

Faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan program tentunya ya harus adanya sinergitas dan kerjasama antar stakeholder dengan instansi dan BNNK Jakarta Timur, karena tanpa adanya kerjasama mereka juga atau dukungan dari pemerintah daerah ataupun kelurahan

program kami tidak bisa berjalan juga, dan keberhasilannya itu tercapainya informasi P4GN dan berkurangnya penyalahguna narkoba di wilayah tersebut. Selain itu jangan sampai seperti ini bahwa masyarakat menganggap masalah narkoba ini masalah individu, selama anggota keluarganya tidak terkena atau memakai narkoba mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitar mereka, nah ini yang mempersulit kami. Secara tidak langsung masyarakat yang acuh akan masalah narkoba ini dapat berdampak kedepannya jika salah satu anggota keluarganya atau temannya menjadi korban narkoba, hal seperti itulah masyarakat belum memahami secara penuh.

4. Program apa saja yang dijalankan oleh seksi P2M sebagai bentuk upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba ?

Kami memiliki program ya namanya itu diseminasi informasi, maksudnya yaitu tugas utama kami adalah melakukan sosialisasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang bahayanya penyalahgunaan narkoba, dengan harapan kami yaitu masyarakat mampu memahami bahwa bahayanya penyalahgunaan narkoba. selain itu dalam hal pemberdayaan masyarakat, selain itu juga ada pemberdayaan masyarakat, dilihat dari kondisi ekonomi dan sosial masyarakat bahwa Jakarta Timur ini kan padat penduduk ya, itu disebabkan banyaknya orang daerah pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dengan pemikiran bahwa kerja di Jakarta enak, tapi kebanyakan mereka tidak memiliki keahlian nah hal itulah yang menjadi kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu mempengaruhi peredaran narkoba karena kontur masyarakat di jakarta timur ini menengah kebawah ya jadi mereka lebih cenderung antipati apalagi kawasan yang sudah rawan narkoba, maka dilakukan program pada bidang pencegahan itu sosialisasi dan diseminasi informasi atau pemberian informasi, pada bidang pemberdayaan masyarakat itu program pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat atau lifeskill di daerah rawan narkoba, dan melaksanakan pembentukn kelurahan bersih narkoba (BERSINAR). Selain itu kami juga ada program advokasi, dimana dengan sasarannya yaitu pengambilan kebijakan di suatu institusi atau lembaga yang bekerjasama dengan BNNK, baik itu pada lembaga swasta, kemeterian, BUMN, sekolah, kampus. Tujuan dari advokasi

ini jika pada suatu lembaga ini melahirkan atau membuat sebuah program kebijakan yang mendukung sifatnya terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba. contohnya seperti suatu lembaga pemerintah mewajibkan melakukan tes urin bagi pegawai baru dan rutin menyelenggarakan tes urin bagi pegawai pemerintahan setiap tahunnya, juga melaksanakan sosialisasi anti narkoba, dan membuat kader-kader anti narkoba. selain itu membuat kebijakan jika ada yang terlibat dalam tindak kejahatan narkoba dilakukan pemberhentian.

5. Apakah sumber daya yang dimiliki Seksi P2M sudah memadai dalam menjalankan program-program P2M ?

Sementara ini masih berkurang, kurang mencukupi, karena hanya terbatas, kami penyuluh juga terbatas dan masih kurang dibandingkan dengan penduduk Jakarta Timur.

6. Apakah sumber daya dalam organisasi khususnya pada Seksi P2M menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal ?

Ya tentu, kami berupaya secara maksimal sesuai dengan program yang ada di RKKL setiap tahunnya, ada program-program prioritas nasional maupun program-program tambahan lainnya dalam hal P4GN melalui ke deputian pencegahan dan ke deputian pemberdayaan masyarakat.

7. Bagaimana hubungan dengan lembaga/organisasi yang bekerjasama dalam menjalankan program-program P2M ?

Lembaga-lembaga kami ada LSM, organisasi antinarkoba, Badan Anti Narkotika, dan masih banyak lagi lembaga-lembaga yang bekerjasama dengan kami yang sudah dituangkan dalam MoU atau nota kesepahaman antar lembaga tersebut dengan BNNK Jakarta Timur.

8. Lembaga/organisasi apa saja yang bekerjasama dalam menjalankan program-program P2M ?

Sangat banyak ya, diantaranya organisasi-organisasi masyarakat FKPPPI, Lembaga Anti Narkoba, NUSANTARA, GEMPITA, KNPI, dan masih banyak lagi, mereka juga sudah melakukan audiensi dengan kami dan melaksanakan MoU kerjasama, termasuk LMK Lembaga Masyarakat Kelurahan, dan FKDM.

9. Apakah terdapat kendala dengan lembaga/organisasi yang bekerjasama dalam menjalankan program-program P2M ?

Memang kendalanya itu secara terprogram, dari unit-unit organisasi, kendalanya adalah kurangnya intensitas antar organisasi tersebut dengan BNNK Jakarta Timur untuk melaksanakan P4GN, jadi hanya sesaat saja pada momen-momen tertentu saja tapi tidak berkelanjutan.

10. Bagaimana cara agar komunikasi dan hubungan antar organisasi dapat berjalan dengan baik ?

Dengan cara saling mendukung antara organisasi tersebut dengan seksi P2M, pada kenyataannya sudah cukup lumayan ya dimana kami melaksanakan kegiatan didukung juga di wilayah tersebut oleh organisasi masyarakat tersebut, dan mereka juga kebanyakan memberi banyak informasi kepada kami baik itu penyalahgunaan narkoba maupun tentang permintaan sosialisasi narkoba.

11. Cara apa yang dilakukan jika terdapat tumpang tindih/mis communication antar organisasi atau agen pelaksana dalam menyampaikan program-program P2M ?

Jika terjadi tumpang tindih ya, kami bisa melakukan pertemuan atau kunjungan, kami selesaikan secara kebersamaan ya tentunya musyawarah dan mufakat.

12. Bagaimana para agen pelaksana melaksanakan program-program P2M ?

Jadi para agen pelaksana selama ini dilakukan pelatihan dan dibentuk baik di lingkungan pendidikan, lingkungan swasta, maupun lingkungan masyarakat, itu setiap tahunnya kami bentuk penggiat anti narkoba namanya yang sudah ada lisensinya melalui Pin yang dicatat di

BNNRI dan kami lakukan pelatihan, setelah itu tergantung mereka mengimplementasikan kepada masyarakat sejauh mana mereka melaksanakannya.

13. Apakah terdapat penanggungjawab dalam setiap kegiatan/program P2M ?

Tentunya ada ya, sesuai dengan yang dituangkan di rencana kerja. Adapun untuk penanggungjawabnya ditentukan oleh kepala sebagai penanggungjawab masing-masing bidang, lalu disampaikan kepada anggota bidangnya masing-masing.

14. Jika terjadi kendala dalam pelaksanaan program-program P2M, bagaimana para agen pelaksana mengatasinya ?

Mereka akan bertanya langsung dan kami akan konfirmasikan melalui grup kami, dan kami akan melakukan audiensi ya untuk menyelesaikannya.

15. Bagaimana proses para agen pelaksana dalam mewujudkan program-program P2M ?

Untuk proses pelaksanaan mereka melaksanakan program kegiatan internal mereka, misalnya pelatihan-pelatihan pembentukan penggiat mereka atau melakukan sosialisasi dengan inovasi mereka sendiri dan mengundang kami sebagai narasumber.

16. Apakah lingkungan eksternal dapat mempengaruhi proses pelaksanaan program-program P2M ?

Iya, untuk lingkungan eksternal seperti masyarakat sangat berpengaruh ya dalam proses pelaksanaannya, bagaimana antusias masyarakat dan mendukung berjalannya pelaksanaan P4GN dan dengan mengikut sertakan kami selaku BNNK dalam menangani permasalahan narkoba tentunya.

17. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam mengimplementasikan program-program P2M ?

Kami ini kan seksi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat ya jadi biasanya faktor pendukung dalam mengimplementasikan program-program P2M ini biasanya semangat dari

masyarakat setempat dan tergantung wilayahnya dan dukungan daripada kelurahan atau pemerintah setempat rt/rw, biasanya kalau mereka mendukung bisa terlaksana dengan baik.

18. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam mengimplementasikan program-program P2M ?

Adapun faktor penghambatnya ya kami selaku pelaksana dari P4GN melihat bagaimana kondisi masyarakat di lapangan tentunya kami harus menyesuaikan kondisi dan keadaan masyarakat. Kendala terbesar kami itu pada saat pandemi Covid ya semuanya menjadi terbatas.



JAWABAN WAWANCARA

Nama Informan : KOMPOL. I Gede Putu Darmawan, SH., MH., MSi

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Seksi Pemberantasan BNNK Jakarta Timur

Tanggal Wawancara : 7 Juli 2022

1. Apa yang menjadi ukuran dan tujuan kebijakan P4GN sebagai upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba ?

Kalau ukuran dan tujuan dari kebijakan P4GN yaitu tercapainya Jakarta Timur ini bebas dari penyalahgunaan narkoba atau Jakarta Timur bebas narkoba atau Jakarta Timur bersih narkoba (BERSINAR), dan kota tanggap ancaman narkoba, berhasil mengungkap jaringan, memetakan jaringan, memetakan wilayah rawan, wilayah kawasan darurat narkoba.

2. Bagaimana cara agar tujuan Kebijakan P4GN dapat terimplementasi ?

Secara internal kita membangun kolaborasi atau kerjasama antar seksi secara internal baik itu BNNK Jakarta Timur, BNNP DKI, dan BNN Pusat itu secara kelembagaan, kemudian secara eksternal dengan lembaga lain kami menjalin komunikasi atau kolaborasi dengan lembaga-lembaga pemerintah baik instansi pemerintah seperti suku dinas atau Pemkot Jakarta Timur, Polres, Imigrasi, Beacukai maupun instansi swasta seperti pengelola apartemen, tempat hiburan malam, pabrik-pabrik, termasuk terminal, pengawasan terhadap pasar.

3. Apakah yang menjadi faktor utama dalam keberhasilan tujuan kebijakan ?

Faktor utama keberhasilan tentunya kolaborasi kerjasama dan membangun sinergitas antar instansi terkait pemerintah atau swasta termasuk penggiat-penggiat narkoba, LMK, tingkat RT RW.

4. Apakah sumber daya yang dimiliki seksi pemberantasan sudah memadai dalam melaksanakan program-program pemberantasan ?

Sumber daya di bidang pemberantasan ini belum memadai ya, untuk sarana dan prasarana kami masih menumpang dengan Kantor Walikota Jakarta Timur, fasilitas juga, anggaran dan personil kami terbatas.

5. Apa saja kekurangan dari sumber daya yang ada di seksi pemberantasan ?

Dalam hal sumber daya kami kekurangan sarana prasarana termasuk personil, karena di sini DSP nya yang semestinya 25 orang, saya disini hanya 6 orang itu sangat kekurangan sekali ya.

6. Bagaimana cara agar komunikasi antar organisasi dapat berjalan dengan baik dalam mengkomunikasikan program-program pemberantasan ?

Kami sebagai seksi pemberantasan salah satu tugas kami yaitu mengungkap jaringan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, melakukan pemetaan wilayah rawan narkoba, dan wilayah kawasan darurat narkoba. dalam menentukan kawasan rawan narkoba yang nantinya kami lakukan pemetaan kami bekerjasama dengan aparat kepolisian, melakukan penindakan, penyelidikan, penyidikan, dan penggerebekan, kami sering melakukan rapat dan tukar informasi.

7. Apa cara yang dilakukan jika terdapat tumpang tindih/mis komunikasi antar organisasi atau antar agen pelaksana dalam menyampaikan program-program pemberantasan ?

Jadi kami bidang pemberantasan sesuai dengan tupoksi kita saja, kami sesuaikan dengan liding sektornya, misalnya dengan imigrasi jika ada warga negara asing menyalahgunakan narkoba secara imigrasi terkena pidana akan tetapi narkobanya kami yang menangani, jadi kita tidak ada tumpang tindih dan miss komunikasi, walaupun dengan polres yang menangani narkoba kami berkolaborasi dan join operasi.

8. Bagaimana para agen pelaksana menciptakan keselarasan dalam melaksanakan program-program pemberantasan ?

Dengan menjalin komunikasi, kolaborasi, konsolidasi menjamin keselarasan dalam kebijakan, kami juga sering rapat tatap muka, dengan itu kami menjalin komunikasi dengan para agen pelaksana.

9. Bagaimana cara agen pelaksana dalam melaksanakan program-program pemberantasan ?

Untuk para agen pelaksana pemberantas melaksanakan tugasnya berdasarkan SOP yang kami punya ya, kami juga melaksanakan tugas sesuai dengan surat perintah dan rujukan-rujukan dari pusat.

10. Apakah para agen pelaksana mengimplementasikan Kebijakan P4GN sesuai dengan standar operasional prosedur ?

Kami melaksanakan kebijakan ini merujuk pada SOP. Kami melaksanakan tugas dan fungsi itu mengacu pada Inpres Nomor 2 Tahun 2020 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. kami juga ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dimana dimiliki setiap seksinya sebagai pedoman untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Namun dalam pelaksanaannya kami terdapat kendala karena sumber daya yang kami miliki terbatas. Dengan terbatasnya sumber daya kami selanjutnya kami akan meminta kepada lurah untu menggandeng dan mengikutsertakan ormas-ormas yang berada di masyarakat seperti PKK, FKDM, LMK, Karangtaruna, dan lain sebagainya untuk mau bergabung dalam kegiatan kami, setelah ditentukan siapa saja orangnya lalu kami berikan pelatihan-pelatihan supaya dapat melaksanakan program-program P4GN di wilayahnya.

11. Jika terjadi masalah dalam pelaksanaan Kebijakan P4GN ini bagaimana para pelaksana mengatasinya ?

Jika terjadi masalah kami akan mencari solusi antar kepala seksi, kami akan berkumpul untuk mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada berkaitan dengan kebijakan. Setelah ditemukan solusi terbaik kami akan beri tanggungjawab kepada setiap seksi sesuai dengan program dan kegiatan, nanti kami laporkan berjenjang ke kepala.

12. Bagaimana proses para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan program-program pemberantasan ?

Dalam mewujudkan jakarta timur bersih narkoba (BERSINAR) kita melakukan penindakan penyelidikan, contoh melakukan pengungkapan kasus, penangkapan, koordinasi dengan beacukai terkait penyelundupan barang, dan kita juga koordinasi dengan imigrasi terkait WNA, kemudian terkait dengan polres polsek kami koordinasi terkait tim assesmen terpadu penyalahguna atau pemakai.

13. Apakah lingkungan eksternal dapat berpengaruh dalam mengimplementasikan program-program pemberantasan ?

Dapat berpengaruh tentunya, penyebabnya kultur budayanya, mereka lebih cenderung antipati apalagi kawasan yang sudah rawan narkoba, selain itu kawasan rawan tapi resisten masyarakatnya bertahan, jadi bagi kami kesulitan dan menjadi penghambat dalam melakukan pemberantasan, masyarakat jakarta timur ini terkesan ada yang tidak mendukung kebijakan atau program ini karena di suatu daerah masih ada kawasan yang rawan, tidak ada keserius dari masyarakat, bekerjasama, dan berkolaborasi dengan kami.

14. apakah faktor penghambat dalam mengimplementasikan program-program pemberantasan dalam aspek ekonomi, sosial dan politik ?

Faktor penghambat kebijakan dilihat dari kondisi ekonomi dan sosial masyarakat bahwa Jakarta Timur ini kan padat penduduk ya, itu disebabkan banyaknya orang daerah pergi ke Jakarta untuk mencari pekerjaan dengan pemikiran bahwa kerja di Jakarta enak, tapi kebanyakan mereka tidak memiliki keahlian nah hal itulah yang menjadi kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk itu mempengaruhi peredaran narkoba karena kultur

masyarakat di jakarta timur ini menengah kebawah ya jadi mereka lebih cenderung antipati apalagi kawasan yang sudah rawan narkoba, selain itu kawasan rawan tapi resisten masyarakatnya bertahan, jadi bagi kami kesulitan dan menjadi penghambat dalam melakukan pemberantasan.



JAWABAN WAWANCARA

Nama Informan : Wiwin Herwina, S.Si., M.Si

Jabatan/Pekerjaan : Kepala Seksi Rehabilitasi BNNK Jakarta Timur

Tanggal Wawancara : 8 Juli 2022

1. Apa yang menjadi ukuran dan tujuan dari program rehabilitasi sebagai bentuk upaya pemulihan penyalahgunaan narkoba BNNK Jakarta Timur ?

Ukuran dari program rehabilitasi ini yaitu ketika seseorang yang sudah menggunakan narkoba ini tidak lagi menggunakan, kemudian sudah pulih karena penggunaan narkoba itu tidak bisa dibilang sembuh ya dia hanya bisa pulih, jadi pulih ini dia dapat kembali produktif bisa melakukan kegiatan sosial dan diterima oleh masyarakat. Sementara tujuan dari rehabilitasi yaitu mengembalikan perilaku seseorang kembali menjadi normal atau perubahan pola perilaku sehingga pengguna narkoba ini bisa pulih dan kembali produktif.

Jika berbicara rehabilitasi ini, bidang rehabilitasi sebenarnya bagaimana kami membantu seseorang dalam melakukan pemulihan, jadi ketika seseorang menggunakan narkoba dan kemudian dengan kesadaran mereka untuk menjalani rehabilitasi, kami berikan konseling sesuai dengan kebutuhan klien, untuk pecandu ringan kami hanya KIE (komunikasi, informasi, edukasi) saja, kalau sedang ada beberapa treatment ya treatment assesmen dengan tools yang kami miliki, kemudian untuk pecandu berat kami rujuk untuk melaksanakan rehabilitasi rawat inap yang berada di balai besar Lido. Untuk rehabilitasi sendiri itu tidak dipungut biaya, jika klien kami ingin rehabilitasi berbayar kami akan memberikan rujukan rehabilitasi ke lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh swasta dan tentunya dengan privasi terjaga. Kami juga melakukan pengawasan dan pemantauan dari perkembangan klien kami yang dititipkan pada lembaga rehabilitasi swasta tersebut.

2. Bagaimana cara agar tujuan program rehabilitasi dapat terimplementasi ?

Tentunya kami selaku liding point dari BNNK salah satunya bidang rehabilitasi, tentunya kami memaksimalkan SDM yang kami bekali dengan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan rehabilitasi seperti konseling, pembinaan satu tahun sekali, kami juga bekerjasama dan menjalin hubungan dengan stakeholder dari instansi pemerintah, swasta, maupun masyarakat terutama, untuk sama-sama melaporkan kepada kami jika terjadi indikasi-indikasi menggunakan narkoba kami akan tangani dan kami akan lakukan rehabilitasi.

3. Apa yang menjadi faktor utama keberhasilan tujuan program rehabilitasi ?

Faktor utama yang menjadi keberhasilan adalah peran semua mulai dari keluarga, masyarakat, dan kami selaku konselor. Pentingnya peran semua masyarakat dan konselor dalam mencapai tujuan program rehabilitasi.

4. Apakah sumber daya yang dimiliki seksi rehabilitasi memadai dalam melaksanakan program-program rehabilitasi ?

Kalau memadai kami belum memadai ya, saat ini kami memiliki 2 dokter, psikolog, dan konselor, tentunya kami membutuhkan tenaga yang lebih ya, tetapi untuk saat ini kami berusaha untuk mencukupi. Saat ini di BNNK Jakarta Timur gedung kami ini bergabung ya dengan walikota Jakarta Timur, kami belum memiliki gedung sendiri, untuk klinik kami ada tetapi untuk konseling harusnya dibikin lebih nyaman, tetapi karena gedung kami masih menumpang ini belum maksimal kita lakukan, tetapi dengan keterbatasan ini kami selalu berusaha memberikan yang terbaik yang bisa kami lakukan untuk klien-klien kami. Kami juga bekerjasama dengan berbagai rumah sakit untuk melakukan rehabilitasi medis pagi klien kami yang mengharuskan di rujuk ke rumah sakit.

5. Apakah sumber daya manusia dalam organisasi melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara maksimal ?

Kami melakukan semua tugas kami tentu dengan harapan yang terbaik ya, dan kami melaksanakan tugas kami juga sesuai dengan standar operasional tentunya.

6. Bagaimana hubungan dengan lembaga yang bekerjasama dalam melaksanakan program-program rehabilitasi ?

Lembaga yang bekerjasama yang bersama-sama bergerak di bidang rehabilitasi, selama ini kami sudah bekerjasama dengan 5 komponen masyarakat yang menyelenggarakan rehabilitasi dari swasta ya, jadi ada 5 yayasan yang selama ini bekerjasama dengan kami tidak hanya melakukan kegiatan rehabilitasi tetapi kami juga pantau kegiatannya apa saja, bekerjasama dengan pihak mana saja, misalnya karena mereka sifatnya swasta ya harus ada kerjasama dengan puskesmas dan sebagainya, artinya di dalam yayasan tersebut harus ada dokter juga yang berkecimpung di bidang rehabilitasi untuk diikutsertakan dalam kegiatan pelayanan rehabilitasi di yayasan-yayasan tersebut.

7. Apakah terdapat kendala dengan lembaga/organisasi yang bekerjasama dalam mengimplementasikan program-program rehabilitasi ?

Kalau kendala tentu ada ya, tetapi hanya misalnya keterlambatan laporan dan lain sebagainya, karena masing-masing pun memiliki kesibukan.

8. Bagaimana cara agar komunikasi dan hubungan antar organisasi dapat berjalan dengan baik ?

Dalam menjalin hubungan dan komunikasi kami dalam setahun ada 2 kali pertemuan, dalam pertemuan tersebut kami sampaikan apa saja yang menjadi kendala di lapangan, kemudian apa yang menjadi target dari program rehabilitasi kami, sehingga jika terjadi kendala di masyarakat ataupun informasi yang tidak jelas dapat disampaikan melalui pertemuan-pertemuan tersebut.

9. Cara apa yang dilakukan jika terdapat tumpang tindih/mis communication antar organisasi ?

Jika terjadi tumpang tindih atau mis komunikasi tentunya kami akan melakukan konfirmasi, melalui pertemuan-pertemuan dan melalui grup komunikasi kami dapat melakukan konfirmasi jika hal itu terjadi.

10. Bagaimana para agen pelaksana menciptakan keselarasan dalam melaksanakan program-program rehabilitasi ?

Karena kami memiliki tujuan dan goals yang sama, maka jika kami melaksanakan program-program rehabilitasi harus dipahami oleh setiap agen pelaksan sehingga berjalan sebagaimana seharusnya, sudah ada peraturan-peraturan yang harus dijalankan.

11. Bagaimana para agen pelaksana menyampaikan program-program rehabilitasi kepada pasien rehabilitasi ?

Jadi bagi masyarakat yang ingin melakukan rehabilitasi dengan sukarela datang langsung ke BNNK Jakarta Timur, lalu kami periksa seberapa besar tingkat kecanduannya kemudian kami akan beri konseling ya secara rutin, biasanya disampaikan ketika pasien rehabilitasi, nanti kami akan beri buku panduan, dan kami lakukan penyampain apa saja program-program dan kegiatan di rehabilitasi kepada klien, atau jika tingkat kecanduannya sudah besar kami merujuknya ke rehabilitasi milik pemerintah yang bekerjasama dengan BNNK Jakarta Timur dan program rehabilitasi ini secara gratis.

12. Apa saja kegiatan/program yang diselenggarakan Seksi Rehabilitasi kepada pasien rehabilitasi ?

Program yang selalu kami selenggarakan yaitu melaksanakan rehabilitasi rawat jalan kepada penyalahguna selama 3 bulan dan 8 kali pertemuan, pelayanan SKHPN yaitu tes urine yang dilaksanakan di klinik kami biasanya dikeluarkan dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh BNNK yang menyatakan seseorang tidak menggunakan narkoba.

13. Bagaimana para agen pelaksana mencapai tujuan Kebijakan P4GN melalui program-program yang diselenggarakan oleh Seksi Rehabilitasi ?

Dalam pelaksanaan kegiatannya selalu ada pendampingan dari kami, kemudian sebelumnya kami juga sudah membuat pertemuan kami membuat rencana tindak lanjut, mana yang menjadi prioritas dari kegiatan kami, mana yang utama yang harus dilakukan, dan kemudian mana yang menjadi prioritas selanjutnya, hal ini kemudian dilaksanakan evaluasi apakah

program berjalan dengan baik, apakah benar apa yang menjadi prioritas kami sudah benar dan dilaksanakan dengan baik, jadi ketika kami menjalankan sesuatu ada pertemuan, briefing, rencana tindak lanjut, dan selalu ada evaluasi setelah program berjalan.

14. Bagaimana proses para agen pelaksana dalam mewujudkan program-program Seksi Rehabilitasi ?

Prosesnya adalah kami datang ke agen-agen pemulihan menemui lurah di wilayah yang sudah kami petakan bahwa wilayah tersebut zona merah dari penyalahgunaan narkoba, selanjutnya kami akan meminta kepada lurah untuk mengundang dan mengikutsertakan ormas-ormas yang berada di masyarakat seperti PKK, FKDM, LMK, Karangtaruna, dan lain sebagainya untuk mau bergabung dalam kegiatan kami, setelah ditentukan siapa saja orangnya lalu kami berikan pelatihan-pelatihan supaya dapat melaksanakan program-program P4GN di wilayahnya.

15. Jika terjadi kendala dalam pelaksanaan program rehabilitasi, bagaimana para agen pelaksana mengatasinya ?

Ketika kami melepas para agen pemulihan di masyarakat tentu saja ada pendampingan, jadi tidak serta merta mereka selesai kami latih kemudian kami lepas untuk melakukan program P4GN sendirian, kami akan dampingi jika mereka belum percaya diri untuk melakukan sosialisasi di masyarakat, jadi kami hadir disana untuk pendampingan.

16. Apakah lingkungan eksternal dapat mempengaruhi proses berjalannya pelaksanaan program-program rehabilitasi ?

Tentu saja, lingkungan eksternal sangat mempengaruhi berjalannya rehabilitasi para penyalahguna, dengan cara melalui dukungan dan tidak mengasingkan penyalahguna yang melakukan rehabilitasi dapat membantu proses rehabilitasi penyalahguna untuk kembali kepada masyarakat.

17. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam mengimplementasikan program-program rehabilitasi ?

Faktor penghambat dan pendukung untuk SDM nya kurang mumpuni tetapi kami selalu melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian masyarakat jika masyarakatnya antipati sudah pesimis apatis hal ini bisa menjadikan faktor penghambat jika sebaliknya akan menjadi faktor pendukung tentunya. Jangan sampai seperti ini bahwa masyarakat menganggap masalah narkoba ini masalah individu, selama anggota keluarganya tidak terkena atau memakai narkoba mereka tidak peduli dengan lingkungan sekitar mereka, nah ini yang mempersulit kami. Secara tidak langsung masyarakat yang acuh akan masalah narkoba ini dapat berdampak kedepannya jika salah satu anggota keluarganya atau temannya menjadi korban narkoba, hal seperti itulah masyarakat belum memahami secara penuh.



LAMPIRAN DOKUMENTASI



Hendradjid Putut Widagdo, S.Sos., MM., M.Si
(Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur)



Heri Santosa, SE., MM
(Staf Seksi P2M Badan Narkotika Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur)



KOMPOL. I Gede Putu Darmawan, SH., MH., Msi
(Kepala Seksi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur)



Wiwin Herwina, S.Si., M.Si
(Kepala Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Administrasi Jakarta Timur)



UNIVERSITAS NASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JAKARTA

BIODATA ALUMNI MAHASISWA
SEMESTER GENAP/GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Nama Mahasiswa : Farhan Abror Aziz
NPM : 183112351550150
Prodi / Konsentrasi : Program Studi Administrasi Publik
Tempat, Tgl. Lahir : Bekasi, 3 Maret 2000
Alamat Rumah : Jl. Al Ikhlas Rt/Rw. 005/002 Kecamatan/Kelurahan
Mustika Jaya Kota Bekasi
Telepon Rumah : -
Telepon Kantor : -
HP : 089659122089
Alamat Kantor : -
E-mail : afarhanabrор@gmail.com

Jakarta, 13 September 2022
Alumni,

Farhan Abror Aziz